

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI WISATA ALAM POHON AKAR SERIBU DI DESA BEGAGANLIMO, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN MOJOKERTO

Bagus Adi Firmansyah¹, Adi Soesiantoro², Indah Murti³

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

bagusadifirmansyah20030820@gmail.com

adisusiantoro@untag-sby.ac.id

endah@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa
Institute*

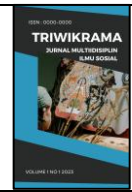
Penelitian ini Membahas strategi Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu di Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Meskipun objek wisata ini memiliki daya tarik alam yang sangat potensial berupa keunikan pohon raksasa berusia ratusan tahun dan aliran sungai yang asri, namun proses optimalisasinya menemui kendala struktural yang cukup berat. Masalah utama berakar pada ketidakjelasan legalitas formal dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung, yang memicu tumpang tindih regulasi serta sempat menimbulkan konflik tata ruang pariwisata antara pemerintah desa dan otoritas kehutanan.

Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Pengembangan Destinasi Wisata dengan model komponen 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) oleh Alastair M. Morrison untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pengelolaan dan kendala yang dihadapi di

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek daya tarik alam sudah sangat kuat dan modal sosial gotong royong masyarakat sangat tinggi. Namun, aspek aksesibilitas masih terbatas pada jalan setapak tanah, fasilitas penunjang masih sangat minim, serta aspek pelayanan tambahan atau legalitas menjadi hambatan paling krusial karena belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi. Selain itu, faktor risiko alam berupa ancaman banjir bandang mendadak dari hulu gunung menjadi tantangan besar bagi keselamatan pengunjung. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa lebih proaktif membangun komunikasi formal dengan Perum Perhutani dan UPT Tahura Raden Soerjo demi mendapatkan kepastian hukum, serta perlunya penerapan sistem mitigasi bencana yang terstruktur.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika administrasi publik dan manajemen pariwisata di tingkat desa, dengan menekankan pentingnya legalitas formal, kolaborasi antar-kelembagaan, serta pengelolaan risiko lingkungan dalam pengembangan ekowisata.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Wisata Alam Pohon Akar Seribu, Strategi 4A, Legalitas Lahan



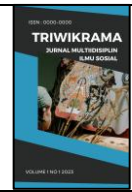
Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini berakar pada potensi geografis Desa Begaganlimo yang terletak di wilayah pegunungan Arjuno-Welirang bagian barat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Desa kuno yang kaya akan pesona alam dan udara sejuk ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dan UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo. Secara historis, kawasan hutan di jalur Begagan-Sentono ini ditengarai sebagai daerah tempat menyepi para pembesar, bangsawan, dan brahmana dari era Kerajaan Kahuripan, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Warisan budaya Majapahitan tersebut dibuktikan dengan tersebarnya berbagai situs alam dan purbakala di sepanjang jalur tersebut, seperti Situs Petilasan Putri Windu Dewi, Situs Batu Bancik, Situs Sentono, Situs Candi Watu Piring, dan Candi Tumpuk, yang menjadikan Desa Begaganlimo memiliki magnet kultural dan nilai sejarah yang sangat kuat.

Di samping peninggalan benda purbakala, kekayaan alam di jalur yang masih utuh dan lestari ini menyimpan potensi ekowisata yang sangat besar, salah satunya adalah objek Wisata Alam Pohon Akar Seribu. Objek wisata ini berpusat pada keberadaan pohon-pohon tua raksasa dari spesies *Ficus Microcarpa* (pohon Kuang) yang memiliki batang berdiameter puluhan meter dan akar eksotis yang menjulang tinggi hingga ratusan meter. Pohon raksasa berusia ratusan tahun ini pertama kali ditemukan di tengah hutan bambu secara swadaya oleh tujuh warga desa pada tahun 2014, yang kemudian dibersihkan bersama anggota karang taruna setempat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan diresmikan sebagai objek wisata pada tahun 2015, lengkap dengan daya tarik visual berupa aliran sungai kecil pegunungan yang jernih dan asri di samping pohon.

Meskipun memiliki keunggulan keindahan alam yang autentik dan prospektif, proses pengoptimalan potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu menemui kendala struktural dan administratif yang cukup berat. Masalah utama yang menjadi batu sandungan bagi kelangsungan ekowisata ini adalah kejelasan status lahan yang berada di dalam kawasan hutan lindung di bawah otoritas UPT Tahura Raden Soerjo dan Perum Perhutani. Akibat dari status tanah yang termasuk kawasan konservasi negara ini, pengelolaan yang awalnya berjalan spontan secara swadaya oleh masyarakat lokal menemui hambatan regulasi formal karena belum adanya izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang sah secara hukum. Hambatan legalitas ini menyebabkan operasional destinasi pariwisata menjadi kurang maksimal, bahkan sempat mengalami fase mati suri dan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan luar daerah.

Ketidakjelasan status kelola dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan sempat memicu pecahnya konflik tata ruang dan ketegangan serius di dalam hutan antara pihak desa dan otoritas kehutanan. Konflik ini bermula ketika pihak UPT Tahura Raden Soerjo membangun pos tiket masuk secara sepihak di dekat area wisata Pohon Akar Seribu tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa maupun warga Begaganlimo. Langkah sepihak ini memicu kemarahan warga lokal yang merasa telah merintis dan membuka area wisata tersebut secara swadaya sejak tahun 2014. Dampak dari terjadinya bentrokan fisik dan ketegangan psikologis di dalam hutan tersebut menyebabkan kedua belah pihak, baik pihak Tahura maupun Pemerintah Desa Begaganlimo, justru saling melepaskan tangan terhadap manajemen operasional wisata Akar Seribu selama beberapa tahun.



Implikasi dari status informal dan ketidakjelasan tata kelola ini berakibat langsung pada tidak tercantumnya Wisata Alam Pohon Akar Seribu dalam situs resmi pariwisata naungan Tahura Raden Soerjo. Ketiadaan informasi secara administratif pada laman resmi instansi pengelola kawasan konservasi tersebut memperkuat bukti nyata lemahnya tata kelola dan legalitas hukum objek wisata ini di tingkat birokrasi daerah. Dampak turunannya adalah Pemerintah Desa Begaganlimo terhambat dalam mengakses dukungan regulasi, alokasi anggaran daerah, sistem promosi yang terintegrasi, serta mempersulit masuknya bantuan fasilitas penunjang pariwisata secara resmi. Meskipun Pemerintah Desa telah berupaya mengajukan surat permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhutani, proses negosiasi tersebut belum mencapai kesepakatan tertulis hingga saat ini.

Tantangan pengembangan wisata di Desa Begaganlimo tidak hanya terbatas pada persoalan legalitas hukum, melainkan juga pada keterbatasan pemenuhan infrastruktur fisik dan aksesibilitas digital di lapangan. Berdasarkan kondisi riil di kawasan wisata, aksesibilitas menuju titik utama daya tarik masih terbatas pada jalur setapak tanah dan bebatuan alami yang sempit dan rawan licin saat musim hujan. Secara aturan hukum kehutanan, jalur ini mutlak tidak boleh dikeras menggunakan semen atau aspal demi menjaga daerah resapan air di zona konservasi. Selain itu, minimnya sarana prasarana dasar (amenitas) seperti toilet, area parkir yang tertata, serta masalah blank spot atau hilangnya jaringan sinyal internet di area lembah hutan menjadi kendala kenyamanan wisatawan, hambatan logistik pedagang warung, sekaligus memperlambat koordinasi darurat.

Selain kendala fasilitas dan sarana, faktor risiko alam (faktor lingkungan) juga menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dalam manajemen pariwisata berkelanjutan di Begaganlimo. Karakteristik hidrologis aliran sungai pegunungan yang berada tepat di samping Pohon Akar Seribu memiliki kerawanan yang tinggi terhadap ancaman banjir bandang mendadak dari wilayah hulu gunung. Kondisi ini sering kali dipicu oleh cuaca ekstrem di mana wilayah puncak gunung mengalami hujan lebat meskipun cuaca di area bawah objek wisata terlihat cerah. Keterbatasan sistem mitigasi bencana yang terstruktur di kawasan wisata ini menjadi salah satu alasan utama pihak UPT Tahura Raden Soerjo bersikap sangat ketat dalam memberikan izin operasional demi menjamin keselamatan jiwa pengunjung.

Dalam upaya membedah secara komprehensif strategi optimalisasi potensi ini, peneliti menggunakan pisau analisis berupa Teori Strategi Pengembangan Destinasi Wisata model komponen 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) oleh Alastair M. Morrison. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antar komponen, di mana pilar daya tarik alami (Attraction) dan modal sosial gotong royong masyarakat sudah sangat kuat, namun pilar akses jalan (Accessibility), fasilitas dasar (Amenity), serta pelayanan hukum kelembagaan (Ancillary) masih sangat lemah akibat ketiadaan PKS resmi. Analisis ini didukung oleh peninjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pariwisata nasional (RIPPARNAS) dengan daerah (RIPPARDA), pentingnya kolaborasi multi-aktor, serta penerapan tata kelola berlapis (Multilevel Governance) demi mengatasi konflik pemanfaatan lahan dengan misi konservasi lingkungan.

Melalui perumusan masalah yang berfokus pada strategi peningkatan pengelolaan pariwisata berkelanjutan serta pemetaan faktor pendukung dan penghambat, penelitian kualitatif deskriptif ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoritis,

karya ilmiah ini ditujukan untuk menambah khazanah ilmu administrasi publik mengenai implementasi ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Secara praktis, draf skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Desa Begaganlimo mengambil langkah proaktif dalam membangun komunikasi formal dengan Perum Perhutani dan UPT Tahura Raden Soerjo guna mendapatkan kepastian hukum, menyusun skema sharing profit retribusi pariwisata yang adil, serta menerapkan manajemen risiko bencana yang aman, mandiri, dan inklusif demi mendongkrak perekonomian desa.

Metode

Desain Penelitian

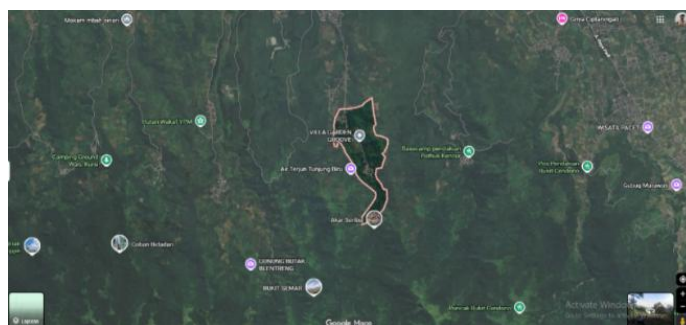
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Wisata Alam Pohon Akar Seribu di Desa Begaganlimo.

Prosedur Intervensi

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 5 responden dari sisi perangkat desa maupun dari para masyarakat dan Tahura untuk kemudian digunakan sebagai data primer. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam atau ahli (expert sampling) tentang tujuan penelitian, yang terdiri dari 3 orang pemerintahan yaitu kepala Desa dan kepala Dusun serta perwakilan TAHURA. Sementara dari sisi lain, peneliti turut mengambil informasi penelitian dari 2 orang masyarakat .

Lokasi Penelitian

Desa Begaganlimo, yang merupakan salah satu dari desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Gondang sendiri memiliki batas wilayah dengan Kecamatan Dlanggu di sebelah Utara, Kecamatan Pacet di sebelah Selatan, Kecamatan Jatirejo di sebelah Barat, dan Kecamatan Kutorejo di sebelah Timur. Secara spesifik, Desa Begaganlimo berbatasan dengan Desa Dilem di sebelah Utara, Hutan Rakyat di sebelah Timur, Sawah Tahura di sebelah Selatan, dan Hutan/Bukit Anjasmara di sebelah Barat. Desa Begaganlimo memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan potensi wisata alam, seperti Pohon Akar Seribu, dan juga memiliki warisan budaya Mojopahitan.



Gambar 1 Tata Letak Desa Begaganlimo
Sumber: Google Maps

Hasil dan Pembahasan

Desa Begaganlimo, yang terletak di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, merupakan sebuah permukiman yang kaya akan pesona alam dan jejak sejarah di lereng barat pegunungan Arjuno-Welirang. Secara historis, asal-usul nama desa ini dipercaya berasal dari kata *Begawan Limo* (Lima Pendeta), yang merujuk pada para tokoh spiritual peninggalan era Hindu-Buddha yang membuka wilayah tersebut, sebelum akhirnya berkembang menjadi pemukiman yang lebih mapan pada masa Perang Diponegoro. Berada di kawasan lembah yang sejuk dan asri, desa kuno ini dulunya berfungsi sebagai jalur perlintasan strategis yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur, mulai dari era Kahuripan, Singasari, hingga Majapahit. Keasrian vegetasi hutan yang mengelilinginya serta udara pegunungan yang murni menjadikan Begaganlimo terisolasi dari hiruk-pikuk perkotaan, namun tetap menyimpan magnet kultural yang kuat dari warisan budaya *Majapahitan* yang masih lestari di kalangan masyarakatnya.

Di era modern, tanggung jawab perangkat Desa Begaganlimo kian berkembang seiring dengan komitmen mereka untuk memajukan potensi lokal, terutama di sektor agrowisata durian dan wisata alam unggulan seperti Akar Seribu. Peran perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi wisata alam Pohon Akar Seribu di Desa Begaganlimo mencakup fungsi yang sangat kompleks dan strategis, mulai dari menjadi pelindung inisiatif lokal yang merangkul swadaya masyarakat dan menjaga warisan budaya, bertindak sebagai negosiator utama untuk melegalkan tata kelola lahan yang berada di bawah otoritas Perhutani dan Tahura Raden Soerjo. Selain itu, perangkat desa juga memikul tanggung jawab besar sebagai fasilitator pembangunan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan dasar pariwisata (attractions, accessibility, amenities, ancillary) sekaligus menyusun peta mitigasi bencana longsor bersama BPBD, demi memastikan keselamatan wisatawan serta mewujudkan tata kelola destinasi yang legal, mandiri, dan berkelanjutan.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu Di Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto

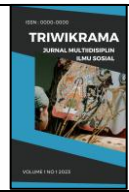
Penyajian data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai kegiatan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Begaganlimo, UPT TAHURA (Taman Hutan Raya) Raden Soerjo dan Masyarakat Desa Begaganlimo. Studi ini membahas tentang bagaimana strategi pemerintah desa Begaganlimo dan Tahura Raden Soerjo dalam Mengoptimalkan Potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu. Untuk menganalisis Strategi Pengoptimalan Wisata tersebut, peneliti menggunakan teori Strategi 4A dari Alastair M. Morrison terdiri dari empat indikator, yaitu Attractions (Daya Tarik), Accessibility (Aksesibilitas), Amenities (Fasilitas), dan Ancillary (Pelayanan Tambahan).

Attractions (Daya Tarik)

Pohon Ficus Microcarpa sebagai unique selling point



Gambar 1 Pohon Akar Seribu
Sumber: Observasi Peneliti



Dalam teori strategi 4A, attractions (daya tarik) merupakan pilar paling krusial karena bertindak sebagai magnet utama atau alasan dasar mengapa wisatawan memilih untuk mengunjungi suatu destinasi. Pohon Akar Seribu atau *Ficus Microcarpa* merupakan pemeran aktif dan utama pada indikator Attractions (Daya Tarik). Dengan adanya daya tarik yang kuat, unik, dan memiliki nilai jual yang jelas (*unique selling point*), komponen lainnya seperti aksesibilitas, sarana prasarana, maupun kelembagaan maka akan berfungsi secara optimal dan akan ada arus pengunjung yang digerakkan sejak awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mathadi Suroso selaku Kepala Desa Begaganlimo Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

” Destinasi di desa Begaganlimo bukan satu satunya hanya Akar Seribu ada Selokendi ada Watu Bajol ada lagi Lembah Harapan ada lagi Watu Piring itu juga semua potensi banget, Tapi kalau dilihat Akar Seribu memang beda karena Akar Seribu ini pohonnya langka, kemudian berdirinya tepat di pinggir sungai dan didasar pohon Akar Seribu ini berdirinya Datar”

Informasi yang didapat tentang data mengenai Attractions (Daya Tarik) Pohon Akar Seribu yang disampaikan oleh Kepala Desa Begaganlimo Kabupaten Mojokerto yaitu Bapak Mathadi Suroso, peneliti kemudian melakukan wawancara berikutnya dengan Kepala Dusun Begagan yaitu Bapak Samidi sebagai Informan Kedua. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 25 Mei 2026 di Desa Begaganlimo, Informan Kedua memberikan pandangan yang senada serta menambahkan dimensi informasi lain terkait daya tarik utama (attractions) berupa pohon *Ficus Microcarpa* tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

“Memang benar Mas, daya tarik utama kita di sini ya struktur akar dari pohon raksasa itu yang tidak ada duanya di tempat lain. Selain karena faktor usianya yang sudah ratusan tahun, letaknya yang berada tepat di samping aliran sungai yang jernih dan tanah yang datar membuat kombinasi alamnya sangat kuat. Wisatawan itu mencari suasana mistis sekaligus asri yang seperti disana. Hanya saja, keunikan alami ini potensinya belum keluar semua karena kita masih kesulitan dalam mengemas dan merawatnya secara resmi akibat masalah batas wilayah hutan kemarin”

Pernyataan dari Bapak Kepala Dusun di atas semakin menegaskan bahwa aspek estetika, keunikan bentuk fisik akar yang menjulang, serta integrasi ekosistem sungai di sekitar objek wisata merupakan *unique selling point* yang sangat potensial bagi keberlangsungan ekowisata di Desa Begaganlimo. Penekanan yang diberikan oleh Informan Kedua juga mengindikasikan bahwa persepsi mengenai kekuatan daya tarik (attractions) tidak hanya dipandang dari sudut pandang visual semata, melainkan juga dari atmosfer pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung saat berada di lokasi. Meskipun terdapat kesepahaman antara Informan Pertama yaitu Bapak Kades dan Informan Kedua yaitu Bapak Kasun mengenai potensi besar serta hambatan lainnya dari keunikan alami Pohon Akar Seribu, peneliti memandang perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dari sudut pandang masyarakat desa Begaganlimo yaitu Ibuk Tin. Langkah ini diambil guna memastikan apakah daya tarik (attractions) yang diklaim oleh pihak pengelola dan pemerintah desa tersebut benar-benar dirasakan dampak dan keunikannya secara riil di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara pada 25 Mei 2026, Ibuk Tin memberikan tanggapan dan pengalamannya sebagai berikut:

“Kelebihan utama di sini itu memang bentuk pohonnya yang unik sekali, Mas, akarnya menjalar ke mana-mana dan pas banget buat latar belakang foto. Suasananya juga masih sangat alami dan asri karena udaranya sejuk. Tapi sayangnya, kalau dari sudut pandang saya, keindahan pohon raksasa ini sedikit kurang kelihatan dari luar karena penataan spot foto atau papan informasi sejarah pohonnya masih minim sekali. Padahal kalau dikemas lebih menarik, orang-orang pasti bakal lebih betah di sini”

Tidak hanya berfokus pada pandangan dari sisi internal pengelola dan eksternal pengunjung,

peneliti juga memandang penting untuk menggali perspektif dari elemen masyarakat yang terlibat langsung dalam perputaran ekonomi di area wisata.

Keberadaan sungai sebagai sumber daya air dan daya tarik visual



Gambar 3 Sungai
Sumber: Observasi Peneliti

Komponen Attractions (daya tarik) dalam pengembangan ekowisata tidak hanya bertumpu pada satu objek tunggal seperti fenomena alami Pohon Akar Seribu, melainkan juga ditentukan oleh integrasi lanskap alam di sekitarnya yang mampu memberikan nilai estetika tambahan. Di kawasan wisata Desa Begaganlimo, keberadaan aliran sungai yang jernih dan mengalir tepat di sepanjang area Pohon Akar Seribu bertindak sebagai elemen pendukung utama yang memperkuat pemenuhan indikator daya tarik visual sekaligus menawarkan pengalaman rekreasi air alamiah bagi para wisatawan.

Validitas mengenai daya pikat lanskap air ini tidak hanya berhenti pada pengakuan masyarakat desa secara umum, melainkan juga dirasakan dampaknya secara riil oleh pelaku usaha pariwisata yang beroperasi di dalam kawasan tersebut. Dari sudut pandang Ibu Mesti, keberadaan sungai yang bersih dan jernih merupakan salah satu kunci utama yang membuat warung mereka terus didatangi pembeli. Beliau menyatakan bahwa:

“Sungai di sini itu berkah tersendiri buat warung-warung kecil seperti punya saya, Mas. Selain aktivitas air diatas (Akar Seribu) banyak juga pembeli menikmati air hamparan sungai dari akar seribu yang mengalir didekat warung saya. Pengunjung itu kalau ke sini pasti nyarinya tempat duduk yang menghadap langsung ke arah sungai. Suara gemercik airnya dan pemandangannya itu yang bikin orang betah nongkrong lama-lama sambil memesan kopi atau makanan. Apalagi kalau hari libur, banyak Pengunjung yang datang ke warungku mas buat beli kopi atau the kalo engga gitu jajanan buat ke atas. Selain itu air Sungai dari turunan diatas juga saya gunakan buat toilet. Jadi kalau kondisi sungai ini kotor atau sampai kering, ya pasti jualan kami ikut sepi karena daya tarik utamanya hilang”

Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan dari pihak TAHURA (Taman Hutan Raya) Raden Soerjo Mengenai Sumber daya air sungai ini. Langkah ini dipandang sangat penting karena secara geografis dan legalitas, aliran sungai yang mengalir di kawasan wisata Pohon Akar Seribu ini bersumber dan melintasi kawasan hutan konservasi yang mereka lindungi. Dalam obrolan yang santai pada 25 Mei 2026, pihak TAHURA menjelaskan fungsi dasar sungai ini dari kacamata pelestarian alam pariwisata:

“Nah itulo yang bikin jadi rawan, maksudnya kita gaberani buka asal sembarang buka ya gitu, kadang gitu dibawah terang diatas hujan, tau tau air udah turun, itulo yang jadikan PR/Kendala.

Itulah yang menjadi faktor alaminya. Kondisi banjir bandang mendadak ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengunjung yang main di sungai. Jadi, kalau pengelola desa cuma fokus keindahan visualnya saja tanpa membuat sistem pengaman banjir yang jelas, kami tidak bisa meloloskan standar kelayakan wisatanya. Keselamatan orang itu nomor satu”

Dari kacamata regulasi kawasan hutan konservasi, aliran sungai di sekitar Pohon Akar Seribu tidak bisa hanya dinilai secara parsial sebagai objek estetika visual atau tempat rekreasi semata. Karakteristik hidrologis sungai yang rentan terhadap ancaman air bah mendadak dari wilayah hulu menjadikan elemen air ini sebagai titik rawan bencana yang menjadi batu sandungan utama dalam pemenuhan legalitas pariwisata. Secara analisis strategi, bahasa kasual yang disampaikan oleh pihak TAHURA ini membongkar adanya gap atau celah perencanaan yang cukup serius. Di satu sisi, pihak internal desa (Informan 1 dan 2) serta pelaku usaha (Informan 4) sangat optimis memanfaatkan sungai sebagai daya tarik tanpa modifikasi besar. Namun di sisi lain, otoritas TAHURA menuntut adanya standardisasi manajemen risiko bencana yang ketat sebelum wisata ini benar-benar dibuka secara resmi dan massal.

Faktor risiko air bah yang menahan keluarnya izin resmi ini juga berdampak langsung pada rasa aman Ibu Mesti dalam menjalankan usahanya di kawasan bawah. Sebagai pemilik warung, beliau sangat memaklumi ketegasan TAHURA soal keselamatan ini, karena jika terjadi bencana akibat izin yang dipaksakan, ekosistem warung pedagang pun pasti akan ikut gulung tikar.

“Saya jualan di bawah sini ya ikut mikir keselamatan orang banyak, Mas. Memang benar kata orang TAHURA, kalau izin resmi operasional itu tidak bisa sembarangan dikeluarkan karena letak pohonnya ada di lembah bawah. Kalau di atas gunung hujan besar, taruhannya nyawa pengunjung kalau sampai ada air bah mendadak. Kalau dipaksakan buka resmi tanpa persiapan, pas ada kejadian kan warung-warung di bawah sini juga ikut kena imbas sepi atau malah ditutup selamanya. Jadi kami pedagang ya manut saja izinnya tertahan dulu”



Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Mesti
Sumber: Wawancara Peneliti

Kesaksian dari Ibu Mesti ini memperlihatkan bagaimana risiko bencana alam memengaruhi persepsi kelayakan kelembagaan di mata pelaku ekonomi mikro. Hambatan belum adanya izin resmi dipandang oleh pedagang bukan sebagai batu sandungan usaha, melainkan sebagai peringatan logis untuk menjaga keberlanjutan ruang kelola wisata. Argumentasi teknis mengenai ditahannya izin resmi operasional ini dikonfirmasi secara gamblang oleh Bapak Joni dan Bapak Dimas selaku perwakilan dari pihak TAHURA Raden Soerjo. Sebagai pemegang otoritas pengawas kawasan konservasi, mereka menegaskan bahwa aspek keselamatan nyawa pengunjung adalah variabel mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan dengan alasan ekonomi semata. Bapak Joni dan Bapak Dimas membeberkan alasan logis dari sudut pandang kebencanaan dan regulasi kehutanan:

“Kami bukannya mau mempersulit keluarnya izin resmi untuk Wisata Pohon Akar Seribu ini, Mas. Tapi kami harus realistis melihat faktor alam di lapangan. Lokasi pohon purba itu kan posisinya pas di cekungan bawah lembah yang menjadi jalur lintasan air dari hulu atas. Karakteristik hutan di sini kalau sudah hujan lebat di puncak, risiko terjadinya air bah atau banjir kiriman mendadak itu sangat tinggi. Kalau kami gegabah mengeluarkan izin resmi sekarang tanpa adanya sistem pengamanan dan mitigasi bencana yang matang dari pihak pengelola, itu namanya kami menjebak wisatawan dalam bahaya. Izin resmi dari provinsi baru bisa lolos kalau pihak desa sudah bisa memahami maksud kami dan menjamin dan membuktikan kalau mereka punya draf SOP keselamatan yang jelas saat terjadi cuaca buruk”



*Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Joni dan Bapak Dimas
Sumber: Wawancara Peneliti*

Penjelasan dari Bapak Joni dan Bapak Dimas ini memberikan penegasan regulasi yang sangat kuat pada komponen Ancillary. Bagi TAHURA, penundaan izin operasional ini adalah bentuk penerapan kebijakan zero accident yang wajib ditaati di seluruh kawasan hutan konservasi negara. Belum terbitnya izin resmi operasional untuk Wisata Alam Pohon Akar Seribu bukan disebabkan oleh masalah administrasi semata, melainkan karena adanya faktor risiko alam yang sangat tinggi berupa ancaman bencana air bah (banjir kiriman) dari hulu atas. Seluruh informan baik dari pihak eksternal TAHURA maupun pihak internal desa (Kades, Dusun, warga, hingga pedagang) memiliki kesepahaman pandangan yang sangat kompak bahwa letak objek wisata yang berada di cekungan lembah bawah sangat rawan saat musim hujan, sehingga aspek keselamatan nyawa harus diprioritaskan di atas legalitas hukum formal.

Pembahasan mengenai strategi dalam mengoptimalkan potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu diawali dengan membedah komponen pertama dari Teori 4A, yaitu Attraction (Daya Tarik). Komponen daya tarik ini dianalisis menggunakan dua indikator utama, yaitu keunikan visual aset alam yang dimiliki dan nilai historis-kultural yang melekat pada kawasan tersebut. Berdasarkan data lapangan, indikator keunikan visual diwakili secara sempurna oleh keberadaan pohon raksasa purba dari spesies *Ficus Microcarpa* (pohon Kuang) yang memiliki diameter puluhan meter dengan sistem perakaran eksotis menjulang tinggi hingga ratusan meter. Keindahan alami ini semakin diperkuat oleh adanya aliran sungai kecil pegunungan yang jernih dan asri yang mengalir tepat di samping pohon, menciptakan sebuah lanskap ekowisata yang sangat potensial dan memiliki daya pikat tinggi bagi wisatawan luar daerah.

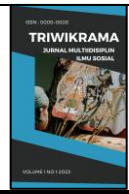
Masih dalam komponen Attraction (Daya Tarik), indikator kedua yang menjadi pilar kekuatan objek wisata ini adalah nilai historis dan kekayaan kultural Majapahitan yang tersebar di sepanjang jalur Begagan-Sentono. Kawasan hutan di lereng barat pegunungan Arjuno-Welirang ini secara historis dipercaya sebagai tempat menyepi para pembesar, bangsawan, dan brahmana dari era Kerajaan Kahuripan, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Keberadaan situs-situs purbakala seperti Situs Petilasan Putri Windu Dewi, Situs Batu Bancik, Situs Sentono, Situs Candi Watu Piring, dan Candi Tumpuk memberikan nilai tambah yang luar biasa. Kombinasi antara keunikan pohon purba raksasa dan warisan sejarah purbakala ini membuktikan bahwa dari segi daya tarik, Desa Begaganlimo memiliki modal yang sangat kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata budaya dan alam yang unggul.

Komponen kedua dari Teori 4A yang dibahas adalah Accessibility (Aksesibilitas), yang dianalisis melalui dua indikator penting, yaitu kondisi fisik jalur transportasi menuju lokasi utama dan regulasi lingkungan yang membatasi pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, indikator kondisi fisik menunjukkan bahwa akses menuju titik utama Pohon Akar Seribu saat ini masih berupa jalur setapak tanah dan bebatuan alami yang sempit. Kondisi medan yang demikian menyebabkan jalur tersebut menjadi sangat rawan dan licin utamanya saat memasuki musim penghujan. Hambatan fisik ini menjadi tantangan serius bagi mobilitas pengunjung karena memerlukan kehati-hatian ekstra untuk dapat mencapai pusat daya tarik wisata di dalam hutan.

Membahas indikator kedua dari komponen Accessibility (Aksesibilitas), keterbatasan fisik jalan tersebut rupanya dipengaruhi secara langsung oleh regulasi ketat status hukum lahan yang berada di bawah otoritas UPT Tahura Raden Soerjo dan Perum Perhutani. Dikarenakan jalur setapak ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan zona konservasi negara, maka secara hukum mutlak berlaku aturan yang melarang keras pengerasan jalan menggunakan semen ataupun aspal. Larangan ini diterapkan demi menjaga integritas fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Akibatnya, pihak pengelola lokal tidak dapat melakukan intervensi infrastruktur modern untuk mempermudah akses jalan, sehingga strategi penataan aksesibilitas harus diarahkan pada pemeliharaan jalur alami yang tetap aman dilalui tanpa merusak ekosistem hutan lindung.

Selanjutnya, pembahasan beralih pada komponen ketiga dari Teori 4A, yaitu *Amenity* (Amenitas atau Fasilitas Penunjang), yang dianalisis menggunakan dua indikator, yaitu ketersediaan sarana prasarana dasar bagi kenyamanan pengunjung dan keberadaan infrastruktur jaringan komunikasi. Untuk indikator ketersediaan sarana prasarana dasar, kondisi riil di objek Wisata Alam Pohon Akar Seribu menunjukkan pemenuhan yang masih sangat minim dan terbatas. Fasilitas vital seperti toilet umum yang layak, serta area tempat parkir kendaraan yang tertata rapi masih menjadi kendala utama yang belum teratasi dengan baik. Keterbatasan amenitas dasar ini secara langsung memengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam ini.

Indikator kedua dari komponen *Amenity* (Amenitas) yang tidak kalah krusial adalah ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi di area wisata. Berdasarkan data dokumen, kawasan lembah hutan tempat Pohon Akar Seribu berada merupakan wilayah yang mengalami kendala blank spot atau hilangnya sinyal internet secara total. Ketiadaan jaringan komunikasi ini membawa dampak domino yang merugikan, di mana wisatawan kesulitan beraktivitas



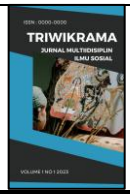
digital, dan para pedagang warung lokal terhambat dalam operasional logistiknya. Lebih jauh lagi, kondisi blank spot ini mempersulit koordinasi darurat antar-pengelola di lapangan, sehingga pemenuhan fasilitas komunikasi menjadi aspek amenities darurat yang mendesak untuk dicarikan solusinya.

Komponen terakhir dari Teori 4A adalah *Ancillary* (Pelayanan Tambahan atau Kelembagaan), yang dibedah melalui dua indikator utama, yaitu legalitas hukum kemitraan antar-aktor dan dukungan administrasi dari birokrasi pemerintah daerah. Indikator legalitas hukum kemitraan merupakan titik lemah terbesar dalam pengelolaan Wisata Alam Pohon Akar Seribu saat ini. Sejak ditemukan secara swadaya oleh tujuh warga desa pada tahun 2014 dan diresmikan tahun 2015, objek wisata ini belum memiliki ikatan hukum formal yang sah. Upaya Pemerintah Desa Begaganlimo untuk mengajukan surat permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum Perhutani guna mendapatkan kepatutan legalitas pengelolaan lahan konservasi tersebut masih belum mencapai kesepakatan tertulis hingga saat ini.

Ketiadaan PKS yang sah berimbas langsung pada indikator kedua dari *Ancillary*, yaitu ketiadaan dukungan administrasi dan promosi dari birokrasi daerah, khususnya UPT Tahura Raden Soerjo. Dampak riil dari kelemahan kelembagaan ini adalah tidak tercantumnya nama Wisata Alam Pohon Akar Seribu di dalam laman atau situs resmi pariwisata naungan Tahura Raden Soerjo. Secara birokratis, ketiadaan pencatatan administrasi ini menutup akses bagi Pemerintah Desa Begaganlimo untuk memperoleh alokasi anggaran daerah, sistem promosi yang terintegrasi, serta mempersulit masuknya bantuan fasilitas fisik penunjang pariwisata dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga perkembangannya menjadi terisolasi secara administratif.

Lemahnya komponen *Ancillary* ini secara historis bahkan telah memicu konflik tata ruang dan ketegangan fisik yang serius di dalam hutan antara warga desa dengan pihak otoritas kehutanan. Konflik terbuka ini pecah saat UPT Tahura Raden Soerjo secara sepihak membangun pos tiket masuk di dekat lokasi wisata tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa maupun warga Begaganlimo. Tindakan sepihak ini memicu kemarahan mendalam dari warga lokal yang merasa memiliki hak moral karena telah merintis, membuka, dan membersihkan area wisata secara swadaya bersama karang taruna sejak awal. Akibat bentrokan tersebut, kedua belah pihak justru memilih untuk saling lepas tangan dari tanggung jawab manajemen operasional, yang menyebabkan wisata Akar Seribu sempat mengalami fase mati suri.

Selain permasalahan tata kelola kelembagaan dan 4A, pembahasan ini juga mengidentifikasi indikator risiko lingkungan atau faktor alam yang menjadi tantangan eksternal terbesar bagi keberlanjutan wisata. Karakteristik hidrologis aliran sungai pegunungan yang mengalir tepat di samping Pohon Akar Seribu memiliki kerawanan yang sangat tinggi terhadap ancaman banjir bandang mendadak. Risiko ini sering dipicu oleh cuaca ekstrem di mana wilayah hulu atau puncak gunung mengalami hujan lebat, meskipun cuaca di area bawah objek wisata terpantau cerah. Dikarenakan belum adanya sistem mitigasi bencana yang terstruktur, pihak UPT Tahura Raden Soerjo bersikap sangat ketat dalam memberikan izin operasional demi melindungi keselamatan jiwa para pengunjung.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan secara ketat terhadap kondisi riil di lapangan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengoptimalan potensi Wisata Alam Pohon Akar Seribu di Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, masih menghadapi ketimpangan yang besar dalam komponen 4A, di mana pilar daya tarik (Attraction) berupa keunikan visual pohon purba raksasa Ficus Microcarpa serta kekayaan situs sejarah Majapahitan dinilai sudah sangat kuat dan potensial, namun belum diimbangi oleh kekuatan pilar aksesibilitas (Accessibility) akibat jalur tanah yang sempit dan licin di kawasan hutan lindung, pilar amenitas (Amenity) yang masih minim sarana toilet, parkir, serta mengalami kendala blank spot sinyal internet, dan pilar kelembagaan (Ancillary) yang sangat lemah karena ketiadaan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) legal dengan Perum Perhutani maupun UPT Tahura Raden Soerjo yang berujung pada terjadinya konflik tata ruang tiket masuk, mati surinya operasional wisata, serta hilangnya hak akses desa terhadap anggaran, promosi terintegrasi, dan bantuan fasilitas dari pemerintah daerah akibat risiko banjir bandang hulu gunung yang belum termitigasi dengan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Pemerintah Desa Begaganlimo. Segera mengambil langkah proaktif membangun komunikasi formal dan menyelesaikan negosiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis dengan pihak Perhutani dan UPT Tahura Raden Soerjo demi mendapatkan kepastian hukum tata kelola lahan.
2. Kepada UPT Tahura Raden Soerjo. Melakukan koordinasi secara terbuka dan administratif dengan Pemerintah Desa sebelum mengambil kebijakan di lapangan (seperti pembangunan pos tiket) guna menghindari konflik tata ruang dan sikap saling lepas tangan.
3. Kepada Masyarakat Lokal / Pelaku Usaha. Mempertahankan semangat gotong royong swadaya dalam merintis potensi wisata, sembari ikut mendukung penataan jalur alami tanpa semen/aspal serta bersiap mengantisipasi kendala operasional akibat *blank spot* komunikasi dan risiko alam.

Daftar Pustaka

- Ada Baloch, Q. B., Shah, S. N., Iqbal, N., Sheeraz, M., Asadullah, M., Mahar, S., & Khan, A. U. (2023). Impact of tourism development upon environmental sustainability: a suggested framework for sustainable ecotourism. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(3), 5917-5930. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>
- Dias, Á., Viana, J., & Pereira, L. (2024). Barriers and policies affecting the implementation of sustainable tourism: the Portuguese experience. In *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* (Vol. 18, Issue 1, pp. 184-202). Routledge. <https://doi.org/10.1080/19407963.2024.2314514>
- Muhammad, F. J., Irawati, I., Halimah, M., Kunci, K., Kebijakan, I., Pariwisata, P., & Pendahuluan, B. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado*. 7. <https://doi.org/10.14710/jiip.v%vi%i.13234>
- Pitha Ningrum, S., Mijiarto, J., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2024). Analisis Gap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Ketapanrame Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2, 624-634.
- Putu Anom, I. (2021). *KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PERIODE 2017-2025 DI KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG*. 9.
- Regiyani, J. A., Amin, K., & Farauqi, M. D. A. Al. (2026). Multilevel Governance and Adaptation of the GSTC International Regime in the Implementation of the Sigending Area Development Policy. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 5(1), 21-34. <https://doi.org/10.55927/ijar.v5i1.15951>
- Rudolf Da Mendez Martina, O. Y. S. K. (2025). *Strategi Sinergi dan Inovasi untuk Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka*. 4.
- Saputra, A., & Ali, K. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR* (Vol. 14).
- Vania Leonyta Putri Arimbawa, N. P., Astuti, P., & Erowati, D. (2025). *"DESA ADAT CANGGU PADA ERA TURISTIFIKASI : INTEGRASI DAN *Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP*.
- Zumar, M., Sekolah, R., Pariwisata, T., & Yogyakarta, A. (2023). *EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN RIPPARDA DESTINASI SUPER PRIORITAS: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING*.